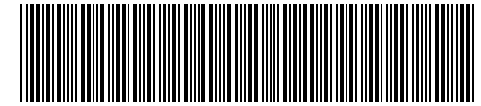




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408837/2023**



DS:5025-8566-3468-1180

Revisi ke 02

Tanggal : 09 April 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 375.000.000 (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 375.000.000
Rp. 375.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 375.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 375.000.000

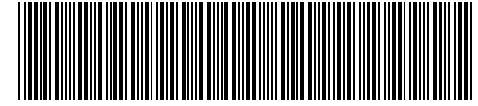
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5025-8566-3468-1180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi				375.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				375.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	54,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		299.500.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	54,00	Rekomendasi Kebijakan		299.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	20,00	Orang		75.500.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	20,00	Orang		75.500.000

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2023

I B. SUMBER DANA



DS:5025-8566-3468-1180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I B. 1

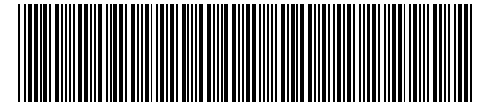
		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	375.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	375.000.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5025-8566-3468-1180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408837	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	-	375.000	-	-	-	375.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	375.000	-	-	-	375.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	375.000	-	-	-	375.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	299.500	-	-	-	299.500	13 . 51	
01	RM	-	299.500	-	-	-	299.500	042	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	75.500	-	-	-	75.500	13 . 51	
01	RM	-	75.500	-	-	-	75.500	042	
JUMLAH		-	375.000	-	-	-	375.000		

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5025-8566-3468-1180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

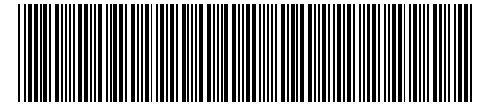
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408837	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	11.996	45.884	65.260	12.000	29.100	33.050	28.195	28.195	28.195	28.195	20.848	44.084	375.000
		BELANJA BARANG	11.996	45.884	65.260	12.000	29.100	33.050	28.195	28.195	28.195	28.195	20.848	44.084	375.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	11.996	45.884	65.260	12.000	29.100	33.050	28.195	28.195	28.195	28.195	20.848	44.084	375.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	11.996	45.884	65.260	12.000	29.100	33.050	28.195	28.195	28.195	28.195	20.848	44.084	375.000

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2023
IV A. B L O K I R**



DS:5025-8566-3468-1180

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408837] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

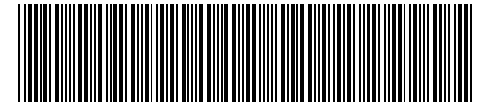
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:5025-8566-3468-1180

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408837] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001